



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PANGKALAN PSDKP JAKARTA



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja (LKj) tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadapsaran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Sigit Bintoro, S.Pi, M.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta	3
1.4. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta	4
1.5. Wilayah Kerja	5
1.6. Armada Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas	7
1.7. Kepegawaian	9
1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Kegiatan Ditjen PSDKP 2025	12
2.2. Rencana Kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta	12
2.3. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2025	14
2.4. Perjanjian Kinerja	16
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta	21
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025	21
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja	22
3.3.1 Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pembinaan POKMASWAS secara efektif	24
3.3.2 Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	24
3.3.3 Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	25
3.3.4 Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	27
3.3.5 Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	29

3.3.6 Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	31
3.3.7 Sasaran Kegiatan 7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang kelautan dan perikanan	31
3.3.8 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	34
3.3.9 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	36
3.4 Akuntabilitas Keuangan	43

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	44
4.2. Rekomendasi	44

BAB V. LAMPIRAN

5.1 PK (Perjanjian Kinerja)	
5.2 Penghargaan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	8
Tabel 2.	Data Armada Kapal Pengawas	9
Tabel 3.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB	9
Tabel 4.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe <i>Speedboat</i>	9
Tabel 5.	Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	10
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025	18
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025	21
Tabel 8.	Nilai Akurasi dan Validitas Intelijen Perikanan	25
Tabel 9.	Capaian IKU Indeks Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	26
Tabel 10.	Nilai Kualitas Pelayanan Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan	26
Tabel 11.	Capaian Indeks Kinerja Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	28
Tabel 12.	Nilai Kualitas Pelayanan Kinerja Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	28
Tabel 13.	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan	32
Tabel 14.	Perhitungan IKU “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan”	32
Tabel 15.	Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan IV tahun 2025	34
Tabel 16.	Rekapitulasi Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) Triwulan IV tahun 2025	37
Tabel 17.	Rekapitulasi Indeks Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) Triwulan IV tahun 2025	38
Tabel 18.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) Triwulan IV tahun 2025	40
Tabel 19.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan IV tahun 2025	41
Tabel 20.	IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Triwulan IV tahun 2025	42
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Maret 2025	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta	5
Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta	6

DATA GRAFIK

Grafik 1. Bagan sistem penyajian laporan kinerja

12



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

PANGKALAN PSDKP JAKARTA



1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu tahun 2025 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) berbasis resiko;
- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) berbasis resiko;
- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bius, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
- d. Penangkapan dan distribusi ikan yang dilindungi (*Cites*) yang tidak memiliki dokumen perizinan;
- e. Kegiatan peredaran lobster, kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020;
- f. Pemanfaatan ruang laut yang harus dilengkapi oleh PKKPR di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2025 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini:

1.5 Wilayah Kerja

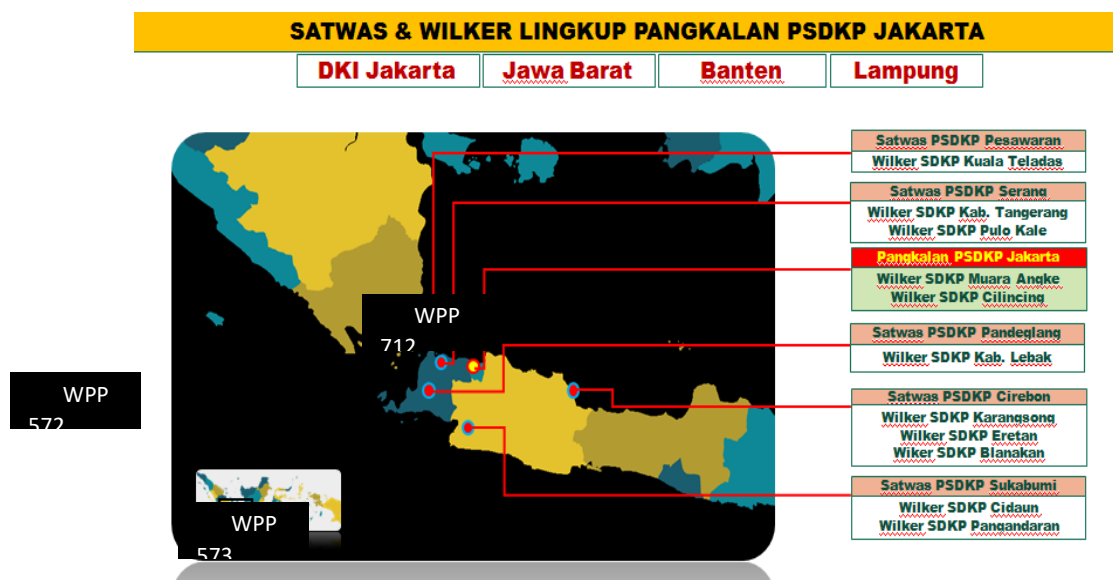
Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan



Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Berikut peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDK P Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas Pandeglang SDKP	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas P Pesawaran SDK	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas P Cirebon SDK	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas P Sukabumi SDK	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas Serang SDKP	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 6 (enam) unit *speedboat* pengawas dan 2 (dua) unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas, *speedboat*, RIB & *rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	<i>Sea Rider</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	<i>Rubber Boat</i>	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter

Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Hiu Biru 003	Pangkalan PSDKP Jakarta	11 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Napoleon 006	Satwas SDKP Cirebon	12 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter

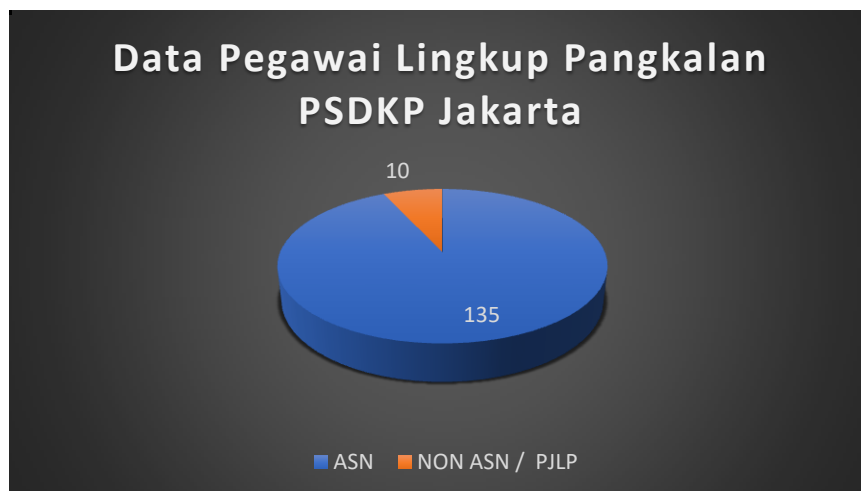
1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia yang ada di Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025 berjumlah 145 orang yang terdiri dari PNS Ditjen PSDKP berjumlah 75 orang, PPPK berjumlah 51 orang, PPPK Paruh Waktu berjumlah 9 orang dan PJLP berjumlah 10 orang, dengan dasar Keputusan Dirjen PSDKP No.82/KEP-DJPSDKP/2022 tentang Penempatan Pengawas Perikanan dan Personel Pada Unit Pelaksana Teknik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

NO	NAMA SATKER	JUMLAH		TOTAL
		ASN	NON ASN / PJLP	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	36	10	46
2	AKP Kapal Pengawas	16	0	16
3	Satwas SDKP Pesawaran	6	0	6
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	0	3
5	Satwas SDKP Serang	3	0	3
6	Satwas SDKP Sukabumi	5	0	5
7	Satwas SDKP Cirebon	6	0	6
8	P3K Pangkalan PSDKP Jakarta	37	0	37
9	P3K AKP Pangkalan PSDKP Jakarta	14	0	14
10	P3K Paruh Waktu Pangkalan PSDKP Jakarta	9	0	9
	Jumlah	135	10	145

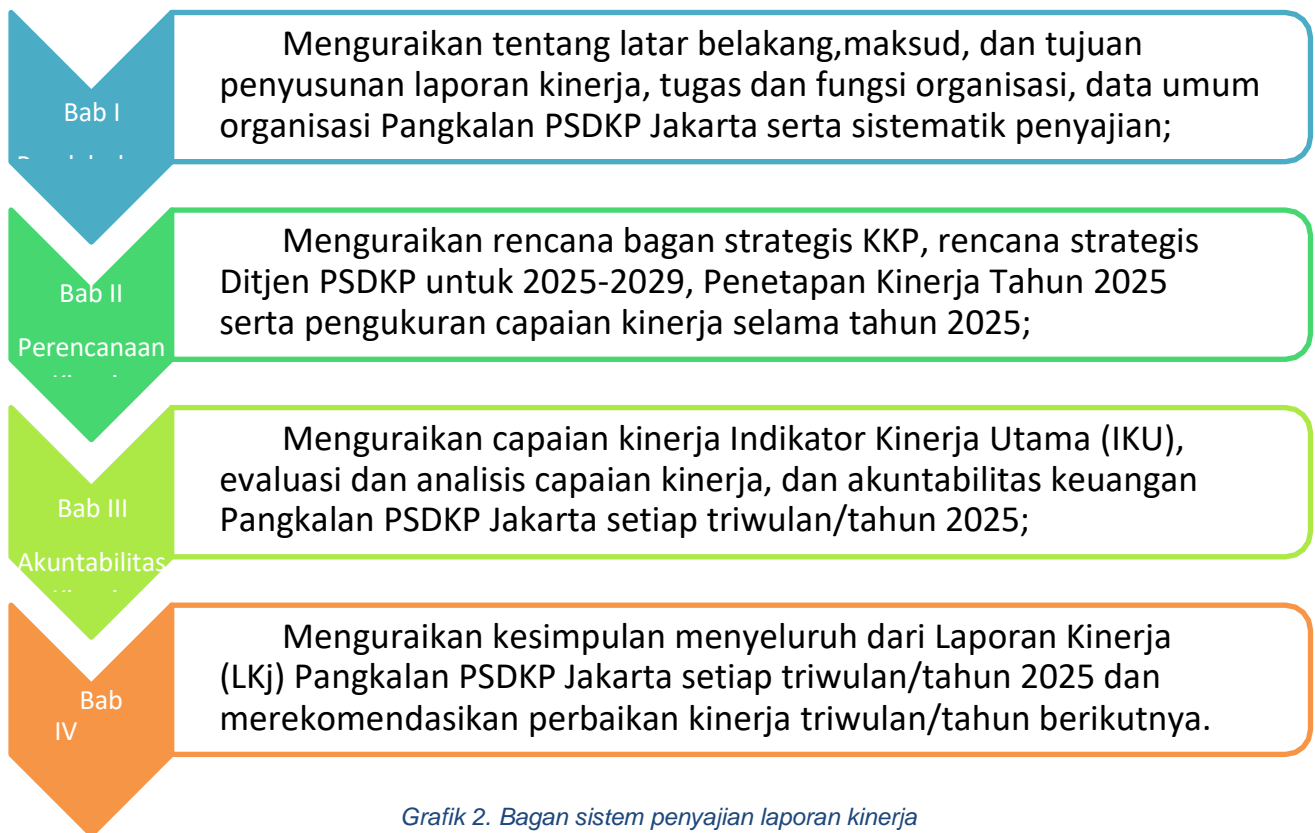
Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada grafik dibawah ini :



Grafik 1. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025 diuraikan pada grafik berikut :





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Renstra Ditjen. PSDKP 2025-2029; ⁽²⁾ Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2025-2029; dan ⁽³⁾ Penetapan Kinerja Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025-2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen

PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP;
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian;
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian;
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien.

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2025

1. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Operasi kapal pengawas;
 - c. Operasi *speedboat* pengawas;
 - d. Armada pengawasan SDKP yang dirawat;
2. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif.
3. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - b. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - c. Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan
 - d. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - e. Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
4. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perangkat pengolah data dan komunikasi;
 - b. Layanan BMN ;

- c. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- d. Layanan organisasi dan tata kelola internal;
- e. Layanan umum
- f. Layanan data dan informasi;
- g. Layanan perkantoran;
- h. Layanan sarana internal;
- i. Layanan manajemen SDM;
- j. Layanan perencanaan dan penganggaran;
- k. Layanan pemantauan dan evaluasi
- l. Layanan manajemen keuangan
- m. Layanan reformasi kinerja.

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada bulan Maret 2025. Perjanjian kinerja mengalami perubahan pada tanggal 15 Desember 2025 dikarenakan terdapat Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 yaitu tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada setiap satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan perjanjian kinerja yang telah dilakukan revisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Tabel Perubahan Semula Menjadi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025

No.	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	IKU 2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai (75))	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (100)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian
2	IKU 3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai (75))	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (100)	Perubahan Nomenklatur, Target Capaian, Perhitungan pada manual IKU
3	IKU 4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) (100)	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (82)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian
4	IKU 5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) (100)	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (82)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian
5	IKU 11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) (94)	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (81)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian

No	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
6	IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai) (88,5)	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (80)	Perubahan Target Capaian
7	IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) (90)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (75)	Perubahan Target Capaian

Perjanjian kinerja yang telah direvisi 15 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)
		3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Indeks)
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Indeks)
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit)
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi Tahun	Capaian Tahun 2025 (%)
SK.1.Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	100	122
SK.2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKU 2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100
IKU 3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100
SK.3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKU 4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	100	122
SK.4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				
IKU 5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	122
SK.5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif				
IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas	92	96.8	105
IKU 7	Indeks operasi speedboat pengawas	92	94.69	103
SK.6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100

SK.7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	100
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	81	100
SK.8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	81	100
SK.9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	71.5	92.62	130
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	92	96.5	105
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	81	84.29	104
IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	86	87.85	102
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta	100	100	100
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	105
IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	80	92.14	115
IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	75	84.9	113
IKU 20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Jakarta	77	80.07	104
IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	81.87	117

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2025 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Kegiatan 1, Terselenggaranya pembinaan POKMASWAS secara efektif

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 1 "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas" ini digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kepulauan Seribu Bagian Selatan. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kegiatan dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Pulau Tidung Kecil. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dalam rangkaian kegiatan pembinaan Pokmaswas Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya telah dilaksanakan di UPPP Muara Angke dan di Pulau Pramuka. Kegiatan pembinaan POKMASWAS telah dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS dan telah memenuhi komponen penilaian sehingga telah tercapai realisasi sebesar 100. Pada tahun **2025**, target iku ini sebesar 82, dan realisasi tetap dapat dipertahankan di angka **100**, dengan capaian kinerja mencapai **122%**.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas dapat tercapai karena adanya dukungan kegiatan yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu

faktor utama pendukung capaian tersebut adalah **pelaksanaan program kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (KPKP)**. Melalui kerja sama ini, pembinaan Pokmaswas dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan efektif, baik dalam bentuk pendampingan, koordinasi lapangan, peningkatan kapasitas, maupun sinkronisasi program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain itu, capaian IKU tetap terlaksana meskipun pada tahun berjalan anggaran masih mengalami penundaan (hold) sebagai dampak dari kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Kondisi tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja secara signifikan karena optimalisasi sumber daya yang tersedia, pemanfaatan kerja sama lintas sektor, serta pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi. Berikut *Capaian POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) Periode 2021-2025* :

Tabel 9. Capaian POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) Periode 2021-2025

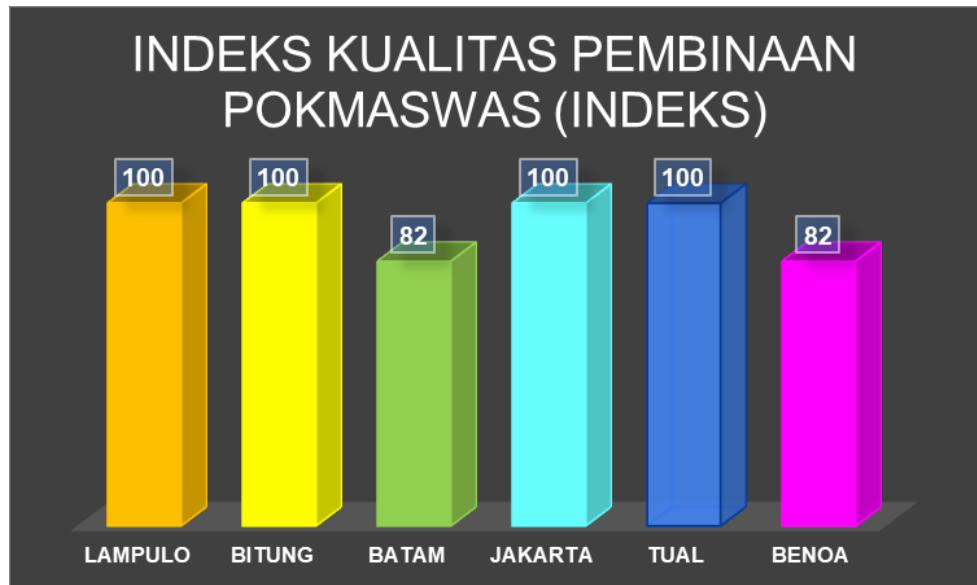
SUB IKU	2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (%)	95	100	120	100	100	100	100	100	100	80	100	120	82	100	120

Pada tahun 2024, meskipun target ditetapkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu 80, realisasi tetap mencapai 100, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Kondisi ini menunjukkan selama tahun 2021 sampai tahun ini Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerjanya.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PSDKP Tahun 2025–2029, indikator Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas ditetapkan sebagai salah satu indikator utama dalam mendukung pencegahan pelanggaran dan peningkatan kepatuhan di sektor kelautan dan perikanan. Pada Tahun 2025, target indeks ditetapkan sebesar 82, dan meningkat di tiap tahunnya. Dengan demikian, target Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan Renstra PSDKP 2025–2029, di mana pencapaian pada Tahun 2025 menjadi dasar penguatan pembinaan pada tahun-tahun berikutnya secara terukur.

Capaian IKU “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas” pada tahun 2025, jika

dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, dan Tual memiliki capaian yang sama dan lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Batam dan Benoa. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP” dengan unit kerja lain :



Grafik 3. Perbandingan IKU 1 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, dan Tual memiliki capaian yang sama sebesar 100% dan lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Batam dan Benoa. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan secara rutin dan berkala.

3.3.2 Sasaran Kegiatan 2, Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

IKU 2 “Kualitas operasi intelijen kelautan”

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan,

penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan :

1. Kredibel dan diterima : >75
2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi : 25 – 75
3. Tidak kredibel dan ditolak : < 25

Terdapat perubahan IKU 2 terkait kualitas operasi intelijen kelautan yang dibandingkan pada tabel semula menjadi sebagai berikut :

Tabel 10. Tabel perubahan IKU 2 kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)

No.	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	IKU 2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai 75)	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (100)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian

Berikut capaian IKU “Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)” pada tahun 2025 dengan realisasi 100 dan capaian 100% :

Tabel 11. Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Periode 2025

SUB IKU	2025		
	T	R	(%)
Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	100	100

Kegiatan Nilai kualitas operasi intelijen kelautan telah dilaksanakan terhadap 8 kegiatan operasi intelijen kelautan dengan rincian kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 12. Rekapitulasi Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan/Usaha yang diawasi	Hasil Operasi
1	Mencari Infomasi LSM	Didapatkan informasi LSM
2	Melakukan inspeksi lapangan untuk melihat kondisi eksisting kegiatan reklamasi	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan adanya aduan dari masyarakat dan ditambahkan dengan surat aduan dari PT. PLN terkait kegiatan reklamasi PT. TRPN, PT. TRPN melaksanakan kegiatan reklamasi tidak memiliki dokumen perizinan PKKPR. PT. TRPN sudah memiliki SHM dan PKKPR darat dari BKPM, KKP melalui Ditjen PSDKP

No.	Jenis Kegiatan/Usaha yang diawasi	Hasil Operasi
		melakukan penghentian kegiatan kegiatan reklamasi.
3	Kegiatan dalam rangka Pemanggilan Kepala desa	Kegiatan dalam rangka Pemanggilan Kepala desa guna dimintai keterangan dengan adanya pembangunan pagar laut
4	Kegiatan dalam Mencari Infomasi Nelayan yang terdaftar dalam Surat Kuasa	Kegiatan dalam Mencari Infomasi Nelayan yang terdaftar dalam Surat Kuasa
5	Inspeksi Lapangan Tindak Lanjut penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Kegiatan inspeksi lapangan lanjutan bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting luasan reklamasi;
7	Kegiatan Pengendalian dan Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL dengan Loka PSPL Serang	Pengendalian dan Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL dengan Loka PSPL Serang melalui wawancara dengan beberapa orang nelayan yang melakukan kegiatan budidaya kerang hijau
8	Laporan Informasi PT ABI	PT Anugrah Buwana Indonesia (ABI) memanfaatkan ruang laut tanpa dokumen perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Berdasarkan Tabel diatas, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan operasi intelijen kelautan dengan realisasi 100 dan capaian 100%. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya.

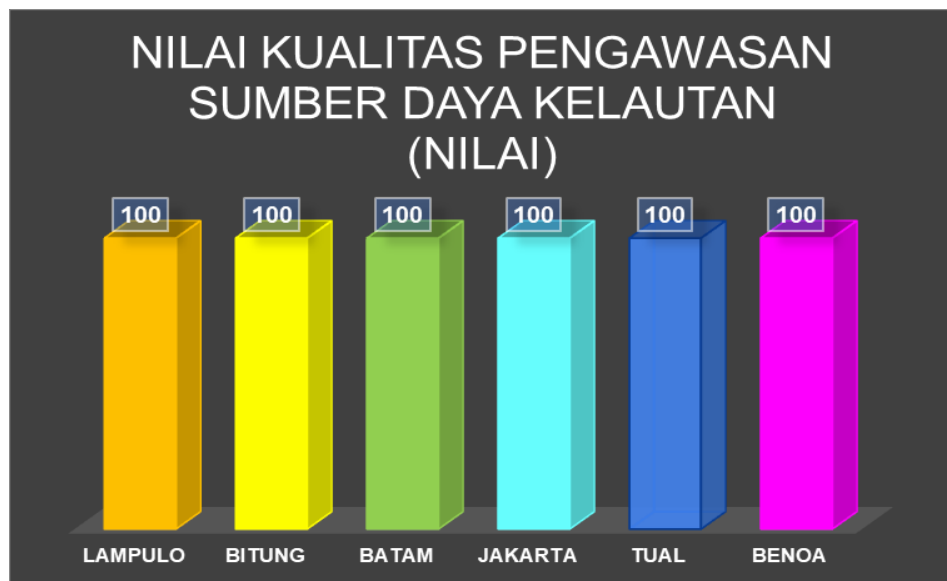
Keberhasilan realisasi Pangkalan PSDKP Jakarta Pada tahun 2025 terkait IKU Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai) dikarenakan adanya pelaporan dan informasi dari masyarakat yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara aktif.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PSDKP Tahun 2025–2029, IKU "Nilai kualitas operasi intelijen kelautan" memiliki nilai yang relatif sama tiap tahunnya yaitu 100. Pada Tahun 2025, target IKU ini ditetapkan sebesar 100 dan telah terealisasi sebesar 100. Dengan demikian, target IKU ini telah sesuai dengan Renstra PSDKP 2025–2029 dan memiliki potensi ketercapaian dengan nilai yang sama untuk tahun berikutnya.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 44,557,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 44,557,000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP

Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Benoa memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 4. Perbandingan IKU 2 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya laporan dan aduan masyarakat yang tidak lanjut dengan segera.

IKU 3 “Kualitas operasi intelijen perikanan”

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen. Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut :

Tabel 13. Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan

No	Kegiatan	Nilai
1	Perencanaan	0.2
2	Pengumpulan data	0.5
3	Pengolahan data	0.2
4	Penyajian	0.1

Tabel 14. Tabel perubahan IKU 3 kualitas operasi intelijen kelautan

No	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1.	IKU 3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai 75)	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (100)	Perubahan Nomenklatur, Target Capain, Perhitungan pada manual IKU

Berikut capaian IKU “kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)” pada tahun 2025 dengan realisasi 100 dan capaian 100% :

Tabel 15. Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan Periode 2025

SUB IKU	TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas Pada tahun 2025 telah dilakukan realisasi IKU kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai) 100 dengan capaian 100%. Kegiatan IKU kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai) berupa giat tindak lanjut terhadap laporan masyarakat berupa ikan invasif. Kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai) merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya.

Operasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu terkait pelaporan masyarakat berupa ikan invasif yang telah di tindaklanjuti oleh pengawas perikanan dilaksanakan di Depok bersama Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok pada tanggal 14 Februari 2025 di Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok terhadap 2 (dua) pelaku usaha.

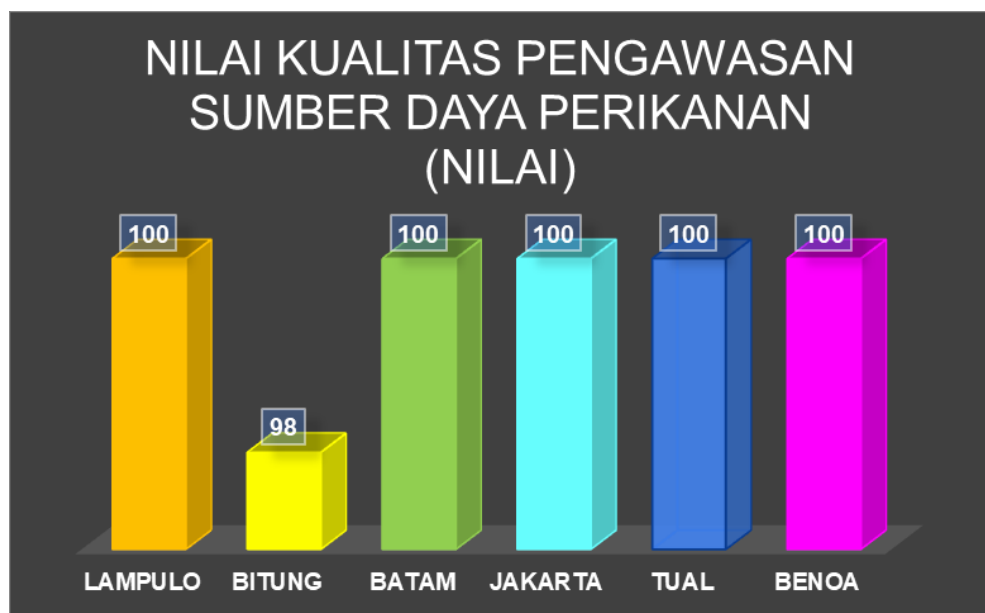
keberhasilan pencapaian kinerja IKU kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai) adalah adanya laporan dan aduan masyarakat yang ditindak lanjut dengan segera.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PSDKP Tahun 2025–2029, IKU "kualitas operasi intelijen perikanan" memiliki nilai yang relatif sama tiap tahunnya yaitu 100. Pada Tahun 2025, target IKU ini ditetapkan sebesar 100 dan telah terealisasi sebesar 100. Dengan demikian, target IKU ini telah sesuai dengan Renstra PSDKP 2025–2029 dan

memiliki potensi ketercapaian dengan nilai yang sama untuk tahun berikutnya.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 37,655,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 37,655,000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 5. Perbandingan IKU 3 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian IKU ini sebesar 100%.

3.3.3 Sasaran Kegiatan 3, Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

IKU 4 “Kualitas pengawasan sumber daya kelautan”

Indeks Kinerja Pengawasan Sumber daya kelautan adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks kinerja Pengawasan Sumber daya kelautan merupakan gabungan dari beberapa

komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Komponen indikator terdiri dari :

- a) nilai penyelesaian pengawasan OSS (Bobot: 45%),
- b) nilai penyelesaian pengawasan selain OSS (Bobot: 40%),
- c) nilai penyelesaian pengawasan insidental (Bobot: 15%)

Tabel 16. Tabel perubahan IKU 3 kualitas operasi intelijen kelautan

No	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1.	IKU 4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) (100)	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (82)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian

Berikut capaian IKU “kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)” pada tahun 2025 dengan realisasi 100 dan capaian 122% :

Tabel 17. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)

SUB IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	95*	100*	120	100*	100*	100	80	100	120	100	100	100	82	100	122

Berdasarkan table diatas realisasi IKU pada tahun 2025 mencapai 100 dengan target sebesar 82 sehingga memperoleh capaian sebesar 122%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 135 pelaku usaha yang berada di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas sudah memenuhi tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan :

Tabel 18. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPERIKSA	NILAI KUALITAS PENYELESAIAN				KETERANGAN	
			PERSIAPAN	PELAKSANAAN	PENYUSUNAN LAPORAN	JUMLAH NILAI		
			10	70	20			
1	Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan	17	10	70	20	100	PERSIAPAN : Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku usaha PELAKSANAAN : Hasil Pengawasan, Form Pengawasan dan/atau data dukung PENYUSUNAN LAPORAN : Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha	
2	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	6	10	70	20	100		
3	Pelaku usaha pemanfaatan Ruang Laut Nasional	97	10	70	20	100		
4	Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	15	10	70	20	100		
JUMLAH TOTAL		135					400	
RATA - RATA						100		

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yang paling banyak ada kegiatan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional yaitu sebanyak 97 pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan seluruhnya telah terdokumentasikan.

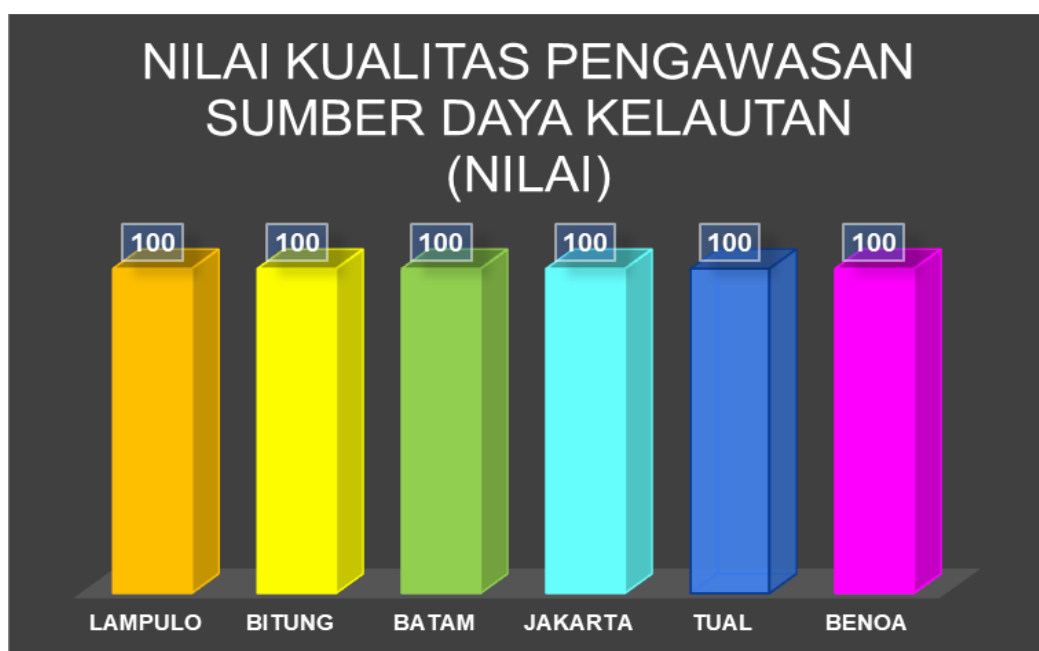
Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan jumlah kegiatan yang terlaksana dengan capaian 100% dan realisasi kegiatan sebanyak 203 pelaku usaha. Jumlah kegiatan yang menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun ini terdapat efisiensi impres 1 yang berdampak pada realisasi kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi tahun 2025 mencapai nilai 100, melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 sebesar 82. Capaian tersebut juga berada di atas target bertahap pada tahun-tahun berikutnya dalam Renstra, yaitu 83 pada tahun 2026, 84 pada tahun 2027, 85 pada tahun 2028, dan 86 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan sumber daya kelautan pada tahun 2025 telah mencapai dan bahkan melebihi target jangka menengah yang direncanakan, serta memiliki potensi yang lebih tinggi dalam ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 311,933,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 311,933,000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat

disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 6. Perbandingan IKU 4 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2025 :

Tabel 19. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya kelautan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Bimtek Drone Mapping dan Remote Pilot Certification	17 – 21 November 2025	Kantor Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Jl. Raya Carita Km 4,5 Caringin Labuan, Caringin, Pandeglang

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
2	Bimbingan Teknis Blue Carbon Padang Lamun	18 - 20 November 2025	Mutiara Carita Cottages, Jl. Raya Carita Labuan KM. 7, Pandeglang, Kec. Carita, Kabupaten Pandeglang

3.3.4 Sasaran Kegiatan 4, Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan IKU 5 “kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)”

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Pemeriksaan pelaku usaha

dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Tabel 20. Perubahan IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)

No.	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	IKU 5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) (100)	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (82)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian

Tabel 21. Capaian kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)

SUB IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	82	100	122

Kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 adalah 100 dengan target yang telah ditentukan sebesar 100, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 122%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan pengawasan telah sesuai dengan rencana kegiatan. Kinerja pengawasan sumber daya perikanan terdiri dari 5 kegiatan pengawasan dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 22. Nilai Kualitas Pelayanan Kinerja Pengawasan Sumber Daya Perikanan

No	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPERIKSA	SATUAN	NILAI KUALITAS PENYELESAIAN			
				PERSIAPAN	PELAKSANAAN	PENYUSUNAN LAPORAN	JUMLAH NILAI
				10	70	20	
1	Pengawasan Rutin (OSS)	11	NKP	10	70	20	100
2	Pengawasan Operasional Kapal Perikanan	9775	Kapal Perikanan	10	70	20	100
3	Pengawasan Importasi Hasil Perikanan	25	NKP	10	70	20	100
4	Pengawasan Kegiatan Perikanan yang Menjadi Atensi Pimpinan	34	Pelaku Usaha	10	70	20	100
5	Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	16	NKP	10	70	20	100
6	Pengawasan DF	2					
JUMLAH TOTAL		9.859				500	
RATA - RATA						100	

Berdasarkan tabel diatas, total kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sebesar 9.859 kegiatan. Kegiatan pengawasan operasional kapal perikanan adalah pelaksanaan pengawasan terhadap kapal yang melakukan keberangkatan dan kedatangan selama tahun yaitu sebanyak 9.775 kapal. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu Lampung, Jawa Barat, dan Jakarta. Seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara, dan Memo/laporan kegiatan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 meningkat 122% dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 100%. Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan berjalan sesuai dengan rencana.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi tahun 2025 mencapai nilai 100, melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 sebesar 82. Capaian tersebut juga berada di atas target bertahap pada tahun-tahun berikutnya dalam Renstra, yaitu 83 pada tahun 2026, 84 pada tahun 2027, 85 pada tahun 2028, dan 86 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan sumber daya kelautan pada tahun 2025 telah mencapai dan bahkan melebihi target jangka menengah yang direncanakan, serta memiliki potensi yang lebih tinggi dalam ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 405,866,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 405,866,000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Tual dan Benoa memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 7. Perbandingan IKU 5 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Tual dan Benoa memiliki capaian IKU yang sama sebesar 100, dan UPT Pangkalan PSDKP Bitung yang memiliki nilai lebih rendah yaitu 98.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2025 :

Tabel 22. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya Perikanan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas Kapal	27 Mei 2025	Kantor BPPMHKP UPT Cirebon
2	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan	17 Juni 2025 – 2 Juli 2025	Secara blended learning

3.3.5 Sasaran Kegiatan 5, Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

IKU 6 “Indeks operasi kapal pengawas (indeks)”

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (5%).

Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks operasi kapal pengawas (indeks)

SUB IKU	2021			TAHUN 2022			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	-	-	-	85	98,33	116	87,6	100	114	92	96,8	105

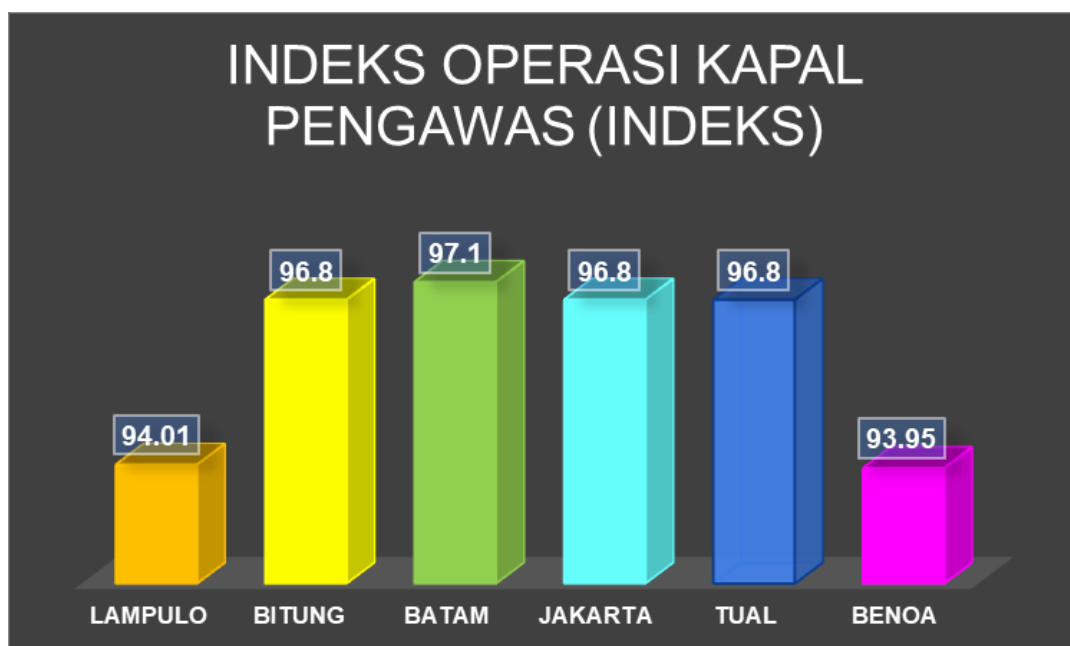
Indeks operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 adalah 96,8 dengan target yang telah ditentukan sebesar 92, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 105%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target pada tahun 2024, dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut

tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya IKU ini dari 100 menjadi 96,8 dikarenakan pada tahun 2025 terkena efisensi Inpres 1 sehingga berdampak terhadap anggaran BBM Kapal pengawas dan adanya blocking anggaran yang tidak bisa digunakan untuk melaksanakan operasi kapal pengawas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target. Realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 96,8, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 sebesar 92. Capaian tersebut juga melampaui target bertahap pada tahun-tahun selanjutnya dalam Renstra, yaitu sebesar 92,25 pada tahun 2026, 92,50 pada tahun 2027, 92,75 pada tahun 2028, dan 93 pada tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas pada tahun 2025 telah berjalan sangat optimal dan berada di atas target jangka menengah Renstra, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas operasi kapal pengawas pada periode 2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 8,440,652,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 7,190,165,285,- (85,18%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 105% dan realisasi anggaran sebesar 85,18% dikarenakan total anggaran operasional kapal pengawas yang berasal dari PNBPNP sebesar Rp 3.393.950.000, yang mendapatkan persetujuan maksimal penggunaan anggaran PNBPNP sebesar Rp 2.143.513.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.250.437.000 yang tidak mendapatkan persetujuan penggunaan PNBPNP dari Kementerian Keuangan.

Capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Bitung dan Tual memiliki capaian yang sama dan UPT Pangkalan PSDKP Batam memiliki nilai lebih tinggi, sedangkan 2 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan Benoa memiliki indeks lebih rendah. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Operasi Kapal Pengawas” dengan unit kerja lain :



Grafik 8. Perbandingan IKU 6 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan dari 2 (dua) UPT yang lain akan tetapi lebih tinggi dari UPT Pangkalan PSDKP Benoa dan Lampulo dan lebih rendah dari UPT Pangkalan PSDKP Batam. Hal ini dikarenakan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi kapal pengawas.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat monitoring dan evaluasi tahun 2025 yang terkait penyusunan rencana operasi kapal dan *speedboat* tahun 2025 yang diikuti seluruh Satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PSKDP.

IKU 7 “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;

- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 adalah 94,69 dengan target yang telah ditentukan sebesar 92, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 103%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target pada tahun 2025, dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2025, pada tabel dibawah ini :

Tabel 23. Rekapitulasi Capaian IKU indeks operasi Speedboat Pengawas (indeks)

SUB IKU	2021			TAHUN 2022			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Indeks operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	-	-	-	85	90,47	106	87,6	98,05	112	92	94,69	103

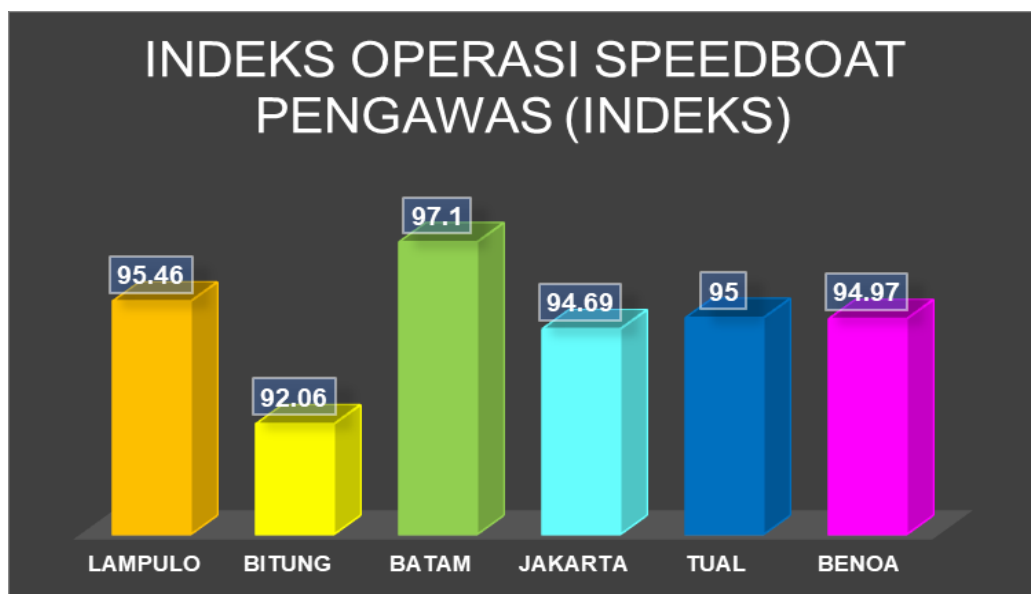
Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 operasi Speedboat Pengawas mencapai realisasi 94,69 dengan capaian 103% jika dibandingkan dengan tahun 2024, operasi Speedboat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Tahun 2025 terget capaian IKU lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024, Menurunnya IKU ini dari 98,05 menjadi 94,69 dikarenakan pada tahun 2025 terkena efisensi Inpres 1 sehingga berdampak terhadap anggaran BBM operasi Speedboat Pengawas dan adanya blocking anggaran yang tidak bisa digunakan untuk melaksanakan operasi Speedboat Pengawas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Operasi Speedboat Pengawas pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target. Realisasi pada tahun 2025 sebesar

94,69, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 sebesar 92. Capaian tersebut juga melampaui target bertahap pada tahun-tahun selanjutnya dalam Renstra, yaitu sebesar 92,25 pada tahun 2026, 92,50 pada tahun 2027, 92,75 pada tahun 2028, dan 93 pada tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas pada tahun 2025 telah berjalan sangat optimal dan berada di atas target jangka menengah Renstra, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas operasi kapal pengawas pada periode 2025–2029.

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 8,440,652,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 7,190,165,285,- (85,218%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 105% dan realisasi anggaran sebesar 85,18% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Benoa, Tual dan Benoa memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks operasi speedbat pengawas (Indeks)” dengan unit kerja lain :



Grafik 9. Perbandingan IKU 7 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta secara keseluruhan berbeda dengan UPT Pangkalan PSDKP yang lain, akan tetapi lebih tinggi dari UPT Pangkalan PSDKP Bitung dan lebih rendah dari UPT Pangkalan PSDKP

Lampulo, Batam, Tual dan Benoa. Hal ini dikarenakan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi kapal pengawas.

3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

IKU 8 “Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 7 (tujuh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),
- b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %)
- c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Penyelesaian perawatan telah terlaksana selama tahun 2025 sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Capaian IKU “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai. Berikut Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2021-2025 :

Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) tahun 2021-2025

IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi kegiatan pada IKU diatas sebesar 100% dengan capaian 100%. Tabel diatas menunjukkan konsistensi nilai pada kegiatan perawatan tahun 2021-2025. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya pada kegiatan ini. Terlaksananya kegiatan perawatan yang sesuai akan berpengaruh pada performa sarana pengawasan dalam mencapai kegiatan operasi kapal pengawas dan *speedboat*. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan perawatan sarana pengawasan dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dan *speedboat* dengan ketua tim kerja Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta.

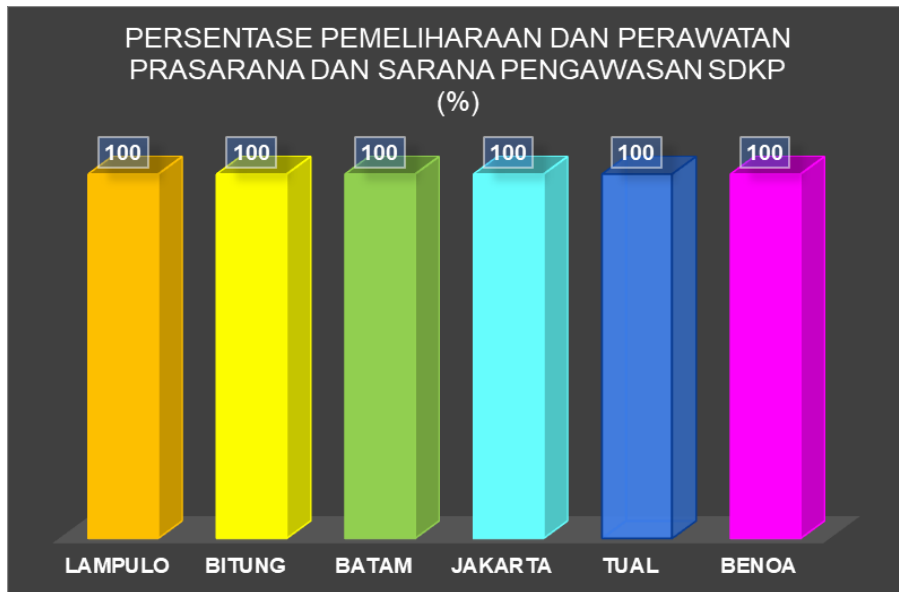
Pada tahun 2025 target IKU ini adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dengan konsistensi nilai 100% maka kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2025 sehingga kegiatan perawatan sarana pengawasan dapat terealisasi dengan baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 100 persen dari target 100 persen. IKU ini berfungsi sebagai indikator pendukung terhadap IKU Level 1, yaitu Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP yang dalam Renstra 2025–2029 memiliki target sebesar 80 pada tahun 2025 hingga 2027, serta meningkat menjadi 81 pada tahun 2028 dan 2029. Capaian IKU tingkat UPT tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Renstra karena perbedaan ruang lingkup dan metode pengukuran pada IKU Level 1. Namun demikian, capaian optimal pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pada tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pemenuhan dan peningkatan Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP pada periode Renstra 2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 1,202,279,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1,202,198,206,- (99,99%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,99% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan

Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 10. Perbandingan IKU 7 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan UPT lainnya. Hal ini dikarenakan setiap UPT melaksanakan kegiatan armada yang dirawat sesuai dengan target yang diberikan yaitu sebesar 100%.

3.3.7 Sasararan Kegiatan 7, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 9 “Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)”

Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada :

- UPT PSDKP untuk pengenaaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 25. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) tahun 2025

SUB IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif dibagi jumlah seluruh kasus pelanggaran administratif. Sampai dengan Desember 2025, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengenaan Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan melalui sistem pemantauan kapal perikanan. Kasus pelanggaran yang dilakukan kapal perikanan seluruhnya sudah di terbitkan Surat peringatan 1 (Satu).

Realisasi untuk IKU ini sebesar 100% dan berdasarkan kriteria indeks, persentase 100% termasuk kedalam nilai indeks maksimal 81 dengan kriteria “baik” sehingga capaian pada IKU ini sebesar 100% karna nilai indeks sesuai dengan target yang telah ditentukan.

IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 81 sesuai dengan target Renstra 2025–2029. Target IKU ini direncanakan meningkat secara bertahap pada periode berikutnya, yaitu menjadi 82 pada tahun 2026, 83 pada tahun 2027, 84 pada tahun 2028, dan 85 pada tahun 2029. Capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja telah berada pada lintasan yang direncanakan dan menjadi dasar yang baik untuk mendukung peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

Periode tahun 2025, kegiatan ini terdiri dari sanksi administratif dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Non SPKP. Sanksi Administratif SPKP pada tahun 2025 yang berasal dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebanyak 791 kasus. Kasus SPKP terdiri dari Transshipment, Pelabuhan Pangkalan, DPI, Jalur (<12 NM), dan Zona Konservasi. 791 Kasus. Terdiri dari SP 1 342 kasus, SP 2 53 kasus, Sanksi Administratif Non SPKP terdiri dari Sanksi Administratif kegiatan Sumber Daya Kelautan terdiri dari 128 SP 1, 5 SP 2, Paksaan Pemerintah 3, Denda Administratif 12 dan Sumber Daya Perikanan terdiri dari 16 SP 1, 1 SP 2, 1 Paksaan pemerintah 5 kasus dan 25 denda administratif, kasus tersebut sudah di tindak lanjuti dan didokumentasikan. Berikut perhitungan IKU “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2025 :

Tabel 26. Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP tahun 2025

NO	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
1	Lampulo	154	0	154	20	38	37	57	0	2	62.50%
2	Batam	136	0	136	2	79	3	46	6	0	96.32%
3	Jakarta	791	3	788	95	65	215	342	53	18	59.51%
4	Benoa	164	12	152	12	81	0	55	4	0	85.37%
5	Bitung	146	0	146	45	60	2	28	7	4	66.90%
6	Tual	164	14	150	23	28	6	84	5	4	73.13%
7	Cilacap	816	0	816	12	35	46	720	0	3	92.87%
8	Belawan	85	7	78	0	0	9	62	0	7	79.49%
9	Kupang	6	0	6	0	0	0	6	0	0	100%
10	Pontianak	54	0	54	0	17	0	37	0	0	100%
11	Tarakan	8	0	8	0	1	0	5	2	0	100%
12	Tahuna	2	0	2	0	0	0	2	0	0	100%
13	Ambon	17	2	15	0	3	0	12	0	0	88.24%
14	Biak	7	0	7	0	5	1	0	0	1	83.33%
	Total	2550	38	2512	209	412	319	1456	77	39	

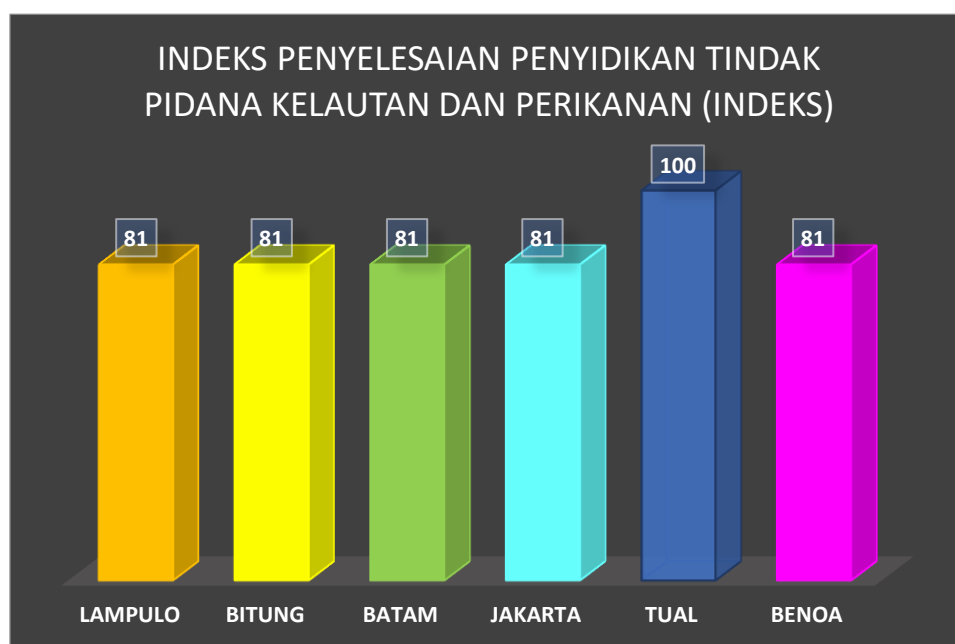
Tabel 27. Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda	
1	LAMPULO	24	4	2		2	15			4	100%
2	BATAM	212	30			18	16	1		1	100%
3	JAKARTA	128	5		3	12	16	1	1	25	100%

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda	
4	BENOA	221	49	2	2	10	45	2	17	16	100%
5	BITUNG	136	27		3	32	17		8	2	100%
6	TUAL	20				3	17	1	4	33	100%
7	CILACAP	20				1	39	1	4	5	100%
8	BELAWAN	27	3	1		5	6			5	100%
9	KUPANG	25	1			2	7			1	100%
10	PONTIANAK	3				3	24	2	3	17	100%
11	TARAKAN	62	9		1	7	6		7	4	100%
12	TAHUNA	0					1		1	1	100%
13	AMBON	26			1	11	9		1	7	100%
14	BIAK	2				1				3	100%
Total		906	128	5	10	109	218	8	46	124	100%

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini terhadap 2 IKU (IKU 9 dan IKU 10) sebesar Rp. 95,631,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 95,631,000,- (100%) . Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks)” dengan unit kerja lain :



Grafik 11. Perbandingan IKU 8 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan 4 (empat) UPT lainnya. Hal ini dikarenakan setiap UPT melaksanakan kegiatan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan target yang diberikan yaitu sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2025 :

Tabel 28. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya Perikanan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Pelatihan Penanganan Barang Bukti Elektronik dan Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	19 – 22 Mei 2025	Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I. No.1, Kel. Cipete Selatan, RT.10/RW.11, Kec. Cilandak, Provinsi DKI Jakarta
2	Pembinaan Teknis (Bimtek) Hukum Laut Internasional TA 2025	6 - 10 Oktober 2025	Kolat Koarmada I, Sunter, Kodamar, Jakarta Utama

IKU 10 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan kegiatan ini. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Realisasi IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) pada Pangkalan PSDKP Jakarta Periode tahun 2025 sebesar 81 dan capaian 100% yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)

SUB IKU	TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	81	81	100

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan rekapitulasi kapal perikanan yang terindikasi pelanggaran berdasarkan surat dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Total kapal perikanan yang melanggar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 791 kapal yang kemudian dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan tahun 2025, pengawas perikanan telah melakukan klarifikasi sebanyak 788 orang/pelaku usaha.

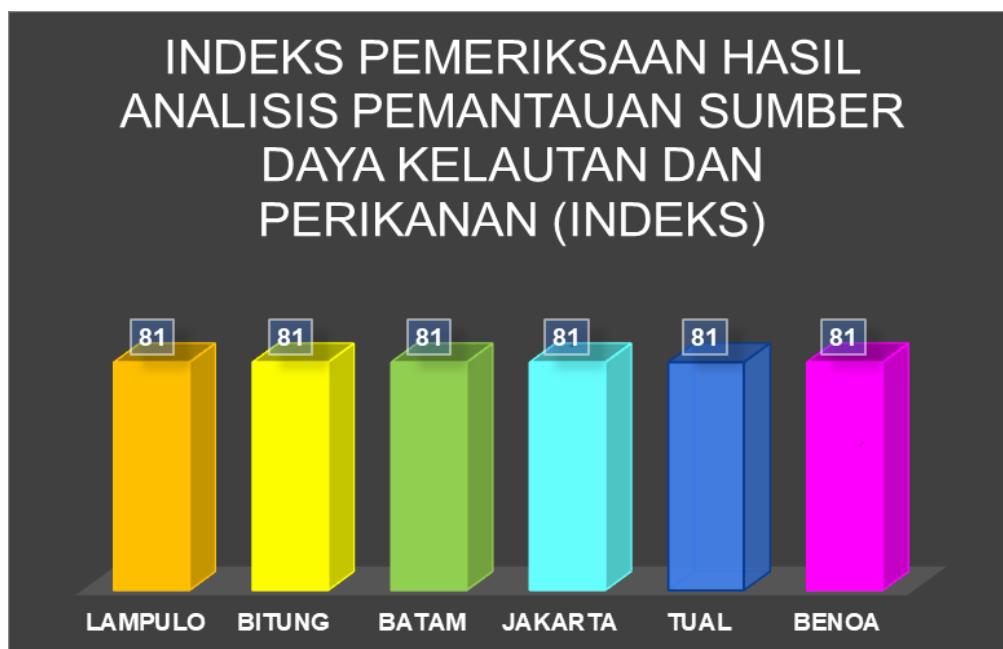
Tabel 30. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)

UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP	
	TRANS SHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPI EXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKANN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DE NDA	%	Kriteria
																		indeks (melihat tabel)
Lampulo	0	1	17	109	16	11	0	154	0	154	20	38	37	57	0	2	100%	81
Batam	2	11	12	90	19	2	0	136	0	136	2	79	3	46	6	0	100%	81
Jakarta	11	80	208	447	16	28	1	791	3	788	95	65	215	342	53	18	99.62%	81
Benoa	2	33	46	54	20	9	0	164	12	152	12	81	0	55	4	0	92.68%	81
Bitung	5	9	41	83	8	0	0	146	0	146	45	60	2	28	7	4	100.00%	81
Tual	4	22	56	71	10	1	0	164	14	150	23	28	6	84	5	4	91.46%	81
Cilacap	8	20	485	293	3	5	2	816	0	816	12	35	46	720	0	3	100.00%	81
Belawan	0	6	4	71	0	4	0	85	7	78	0	0	9	62	0	7	91.76%	81
Kupang	0	1	1	0	0	4	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	100%	81
Pontianak	0	0	8	43	3	0	0	54	0	54	0	17	0	37	0	0	100%	81
Tarakan	0	2	1	5	0	0	0	8	0	8	0	1	0	5	2	0	100%	81
Tahuna	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	100%	81
Ambon	0	1	8	8	0	0	0	17	2	15	0	3	0	12	0	0	88.2%	81
Biak	0	0	3	4	0	0	0	7	0	7	0	5	1	0	0	1	100%	81
Total	32	187	891	1278	95	64	3	2550	38	2512	209	412	319	1456	77	39	97.41%	81%

IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 81 sesuai dengan target Renstra 2025–2029. Target IKU ini direncanakan meningkat secara bertahap pada periode berikutnya, yaitu menjadi 82 pada tahun 2026, 83 pada tahun 2027, 84 pada tahun 2028, dan 85 pada tahun 2029. Capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja telah berada pada lintasan yang direncanakan dan menjadi dasar yang baik untuk mendukung peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini terhadap 2 IKU (IKU 9 dan IKU 10) sebesar Rp. 95,631,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 95,631,000,- (100%) . Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Benoa memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks)” dengan unit kerja lain :



Grafik 12. Perbandingan IKU 9 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan semua UPT lainnya yaitu 81.

3.3.8 Sasaran Kegiatan 8, Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

IKU 11 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di claim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.

Tabel 31. Perubahan IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) tahun 2025

No	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	IKU 11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) (94)	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (81)	Perubahan Nomenklatur dan Target Capaian

Realisasai IKU “Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)” pada tahun 2025 di Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 81 dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 32. Rekapitulasi Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) tahun 2025

SUB IKU	TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	81	81	100

Tercapainya realisasi IKU ini dikarenakan terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana yang selesai di proses

Tabel 33. Rekapitulasi Perhitungan capaian kinerja tahun 2025 Penyelesaian penyidikan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan

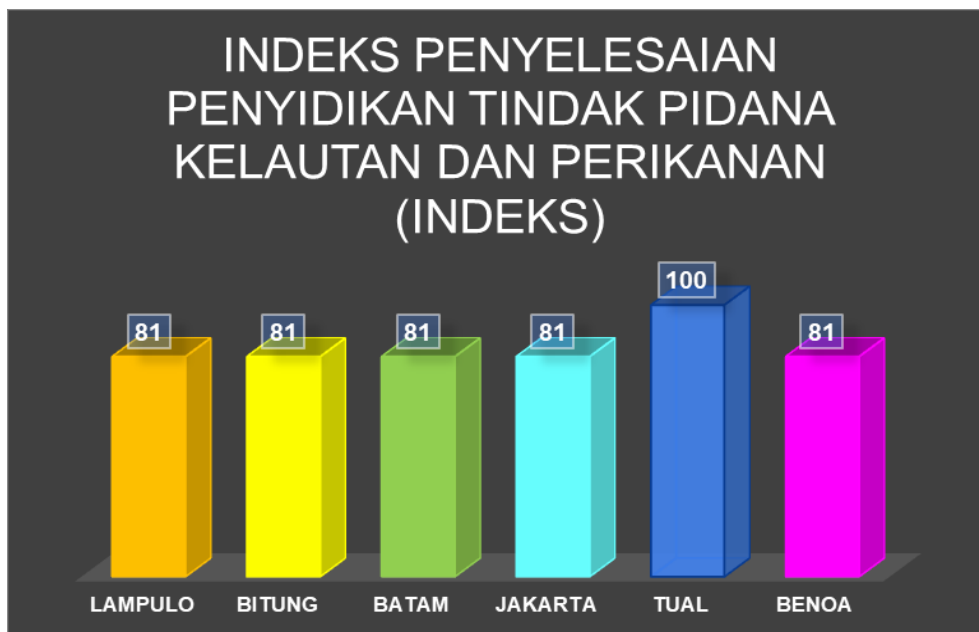
Perkara	Tahun 2025		Capaian Tahun 2025 (%)	Kategori Indeks (Nilai)
	Total Kasus	Kasus Selesai		
Ditjen PSDKP	37	33	89.19%	81
Dit. PP	3	3	100%	81
Pangkalan PSDKP Jakarta	1	1	100%	81
Pangkalan PSDKP Batam	5	5	100%	81
Pangkalan PSDKP Lampulo	3	3	100%	81
Pangkalan PSDKP Benoa	2	2	100%	81
Pangkalan PSDKP Bitung	5	5	100%	81
Pangkalan PSDKP Tual	1	1	100%	81
Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100%	81
Stasiun PSDKP Tahuna	8	4	50%	71
Stasiun PSDKP Ambon	0	0	-	81
Stasiun PSDKP Kupang	0	0	-	81
Stasiun PSDKP Biak	3	3	100%	81
Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100%	81
Stasiun PSDKP Belawan	3	3	100%	81
Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100%	81

IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 81 sesuai dengan target Renstra 2025–2029. Target IKU ini direncanakan meningkat secara bertahap pada periode berikutnya, yaitu menjadi 82 pada tahun 2026, 83 pada tahun 2027, 84 pada tahun 2028, dan 85 pada tahun 2029. Capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja telah berada pada lintasan yang direncanakan dan menjadi dasar yang baik untuk mendukung peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 76,639,000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 76,639,000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran sangat efisien.

Capaian IKU “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT

Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam dan Benoa memiliki capaian yang sama dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Tual. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks)” dengan unit kerja lain :



Grafik 13. Perbandingan IKU 11 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks)” memiliki indeks sama dengan semua UPT lainnya yaitu 81 lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Tual yaitu 100. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah :

Tabel 34. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya Perikanan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Pelatihan Penanganan Barang Bukti Elektronik dan Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	19 – 22 Mei 2025	Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I. No.1, Kel. Cipete Selatan, RT.10/RW.11, Kec. Cilandak, Provinsi DKI Jakarta
2	Pembinaan Teknis (Bimtek) Hukum Laut Internasional TA 2025	6 - 10 Oktober 2025	Kolat Koarmada I, Sunter, Kodamar, Jakarta Utama

3.3.9 Sasaran Kegiatan 9, Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Dalam rangka pencapaian SK “Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SK 9 :

IKU 12 “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)”

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 kedalam aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Pengukuran kinerja IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 71,5. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025 adalah 92,62 dengan capaian sebesar 130%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai nilai target yang ditentukan pada tahun berjalan. Keberhasilan pada iku ini tidak lepas dari peran aktif dari koordinator tingkat Seditjen yang secara berkala mengingatkan progress nilai kinerja anggaran di aplikasi grup *Whatsapp*.

Pada tahun 2025, realisasi IKU ini sebesar 92,62 dengan capaian sebesar 105%. Adapun rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran periode tahun 2021-2025 sebagai berikut :

Tabel 35. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) periode 2021-2025

IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	86	86,55	100	81	85,54	106	82	84,82	103,4	71,5	92,62	130

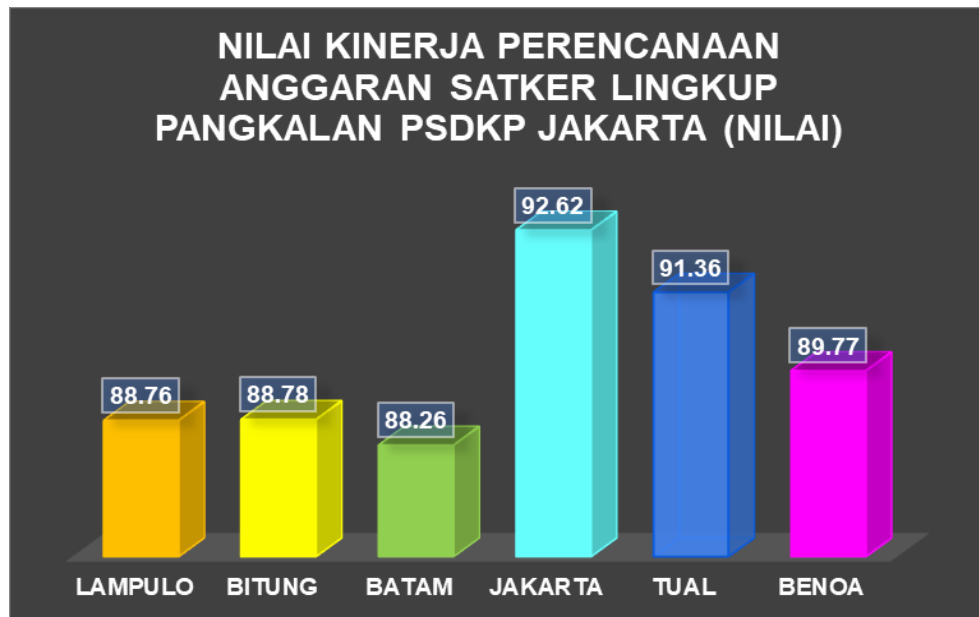
Pada tahun 2024, IKU ini terealisasi sebesar 84,82 dengan capaian sebesar 103,4% sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92,62 dengan capaian sebesar 130%. Pangkalan PSDKP Jakarta bisa mencapai target yang ditentukan dikarenakan kegiatan ini didukung dengan anggaran penataan organisasi dan tata kelola, walaupun anggaran tersebut masih terkena efisiensi Inpres 1 sehingga adanya penurunan target tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka Pangkalan PSDKP Jakarta sudah mencapai target IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” yang telah ditentukan pada tahun 2025. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Satker Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 92,62, melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 71,5. Dalam Renstra, indikator pada level Ditjen PSDKP ditargetkan meningkat secara bertahap setiap tahun hingga 82,5 pada tahun 2029. Meskipun indikator pada tingkat Satker dan Ditjen memiliki perbedaan lingkup pengukuran, capaian NKA Satker Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025 memberikan kontribusi yang baik dan menjadi dukungan kuat terhadap pencapaian target kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP pada periode Renstra 2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan terhadap 2 IKU (IKU 12 dan IKU 13) sebesar Rp.1.500.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien.

Capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 14. Perbandingan IKU 12 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai) memiliki indeks berbeda dengan semua UPT lainnya yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Tual dan Benoa, dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU 13 “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Capaian kinerja IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Penilaian IKU Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Nota Dinas NOMOR 111/SJ.2/RC.610/I/2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 realisasi Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 96,5 dengan capaian sebesar 105%.

Tabel 36. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) periode 2021-2025

IKU	2021			Tahun 2022			Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	89	95,87	107	89	95,13	107	93,75	90,71	96,76	92	96,5	105

Berdasarkan data diatas, nilai realisasi pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, tahun 2024 IKU ini terealisasi sebesar 90,71 dengan capaian sebesar 96,76% sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 96,5 dengan capaian sebesar 105%. Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mencapai target yang ditentukan dikarenakan monitoring dan evaluasi terhadap IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” yang dilakukan secara berkala oleh tim keuangan.

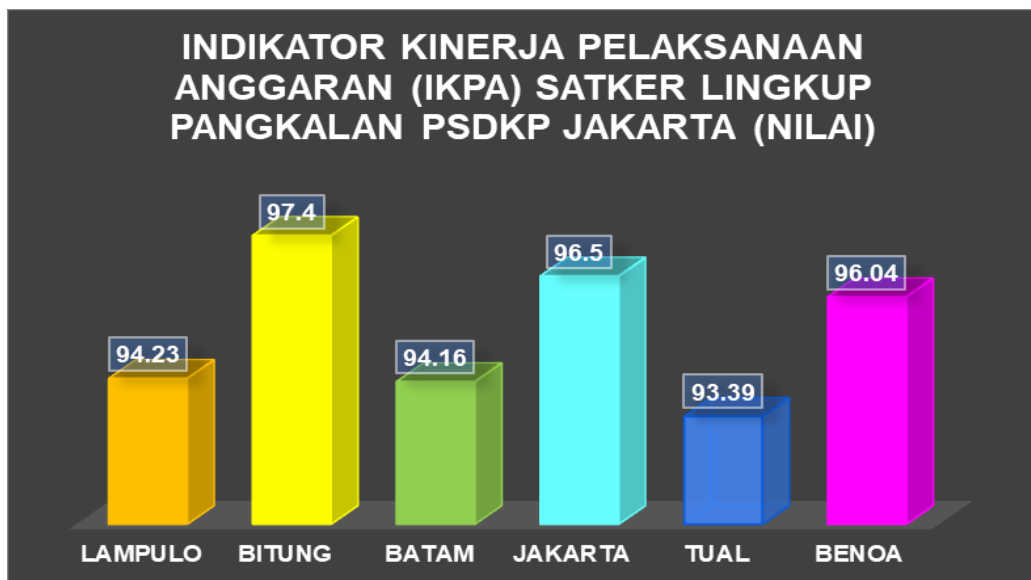
Pada tahun 2025 target IKU ini adalah 92. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka Pangkalan PSDKP Jakarta berpotensi untuk mencapai target IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” yang telah ditentukan pada tahun 2025. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 96,5, melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 92. Capaian ini memberikan dukungan positif terhadap pencapaian target IKPA Ditjen PSDKP yang direncanakan meningkat secara bertahap pada periode Renstra

2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan terhadap 2 IKU (IKU 12 dan IKU 13) sebesar Rp.1.500.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien.

Capaian IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 15. Perbandingan IKU 13 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU ndikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) memiliki nilai berbeda dengan semua UPT lainnya yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Tual dan Benoa, dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas,

disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Pengukuran kegiatan ini dilakukan setiap semester sehingga belum ada perhitungan pada periode ini. Berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4) Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025. beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain :

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Penilaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada semester II tahun 2025 berdasarkan nota dinas Nomor 22/DJPSDKP.1/TU.210/I/2026 dari Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP dengan realisasi IKU Pangkalan PSDKP Jakarta adalah sebesar 84,29% dengan capaian 104%. Berikut perbandingan IKU periode 2021-2025.

Tabel 37. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) periode 2021-2025

IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta	73	79,69	114	77	80,31	104	78	83,17	106,6	81	84.29	104%

Berdasarkan data diatas menunjukkan nilai pada tahun 2025 secara realisasi meningkat dan mengalami penurunan secara capaian, hal tersebut terjadi karena target pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan target setiap tahun dari tahun 2025

merupakan sebuah tindakan yang positif untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga target pada tahun ini meningkat dari 78 menjadi 81. Realisasi IKU pada tahun 2025 sebesar 84,29 dengan capaian sebesar 104,062%.

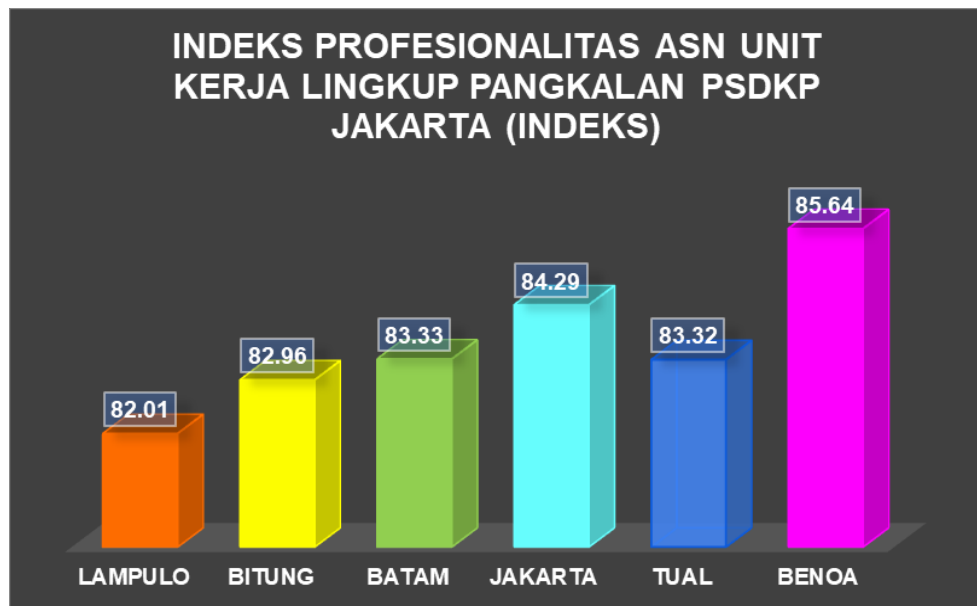
Pada tahun 2024, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 83,17 dengan capaian 106,6%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU ini mengalami peningkatan sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerja dalam meningkatkan indeks profesional ASN. Meningkatnya nilai IP ASN tidak lepas dari kinerja tim kepegawaian Pangkalan PSDKP Jakarta yang selalu mengingatkan setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek/diklat/seminar/kursus yang di share pada group *WhatsApp*.

Pada tahun 2025 target IKU ini adalah 81 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Indeks Profesional ASN yang telah ditentukan pada tahun 2025. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi 84,29, melampaui target tahun 2025 pada PK Pangkalan PSDKP Jakarta dan dalam Renstra 2025–2029 yaitu sebesar 81. Capaian tersebut bahkan telah melampaui target Renstra hingga tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 83, sehingga menunjukkan kinerja pengelolaan dan pembinaan profesionalitas ASN yang sangat baik di lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.8.091.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.091.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” dengan unit kerja lain :



Grafik 16. Perbandingan IKU 14 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks) memiliki nilai UPT capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, dan Bena dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Pangkalan PSDKP Tual.

IKU 15 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) telah disampaikan melalui surat dinas nomor B.2409/DJPSDKP.1/RC.510/VII/2025 22 Juli 2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Tahun 2025 realisasi Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 87.85 dengan capaian 102% Pengukuran didasarkan dari nilai NKO setiap tahun dari aplikasi kinerjaku. Berikut perbandingan IKU “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” periode 2021-2025.

Tabel 37. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) periode 2021-2025

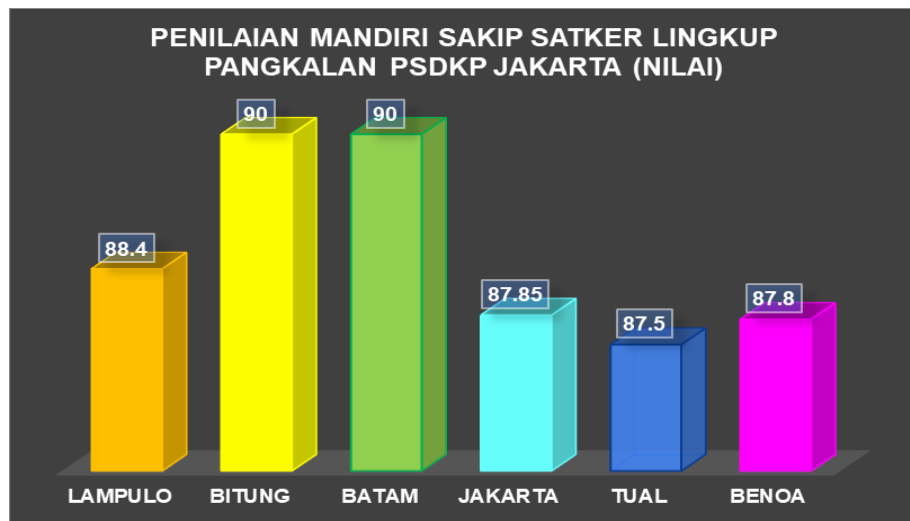
IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	-	-	-	-	-	-	80,50	79,25	98,45	86	87.85	102

Pada tahun 2025 realisasi 87,85 dengan capaian 102% jika dibandingkan tahun 2024 realisasi 79,25 dengan capaian 98,45% IKU ini mengalami peningkatan sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerja dalam meningkatkan penilaian mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi 87,85, melampaui target internal tahun 2025 sebesar 86. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, yaitu 88 pada tahun 2025, 88,2 pada tahun 2026, 88,4 pada tahun 2027, 88,6 pada tahun 2028, dan 88,8 pada tahun 2029, capaian tahun 2025 tersebut masih sedikit di bawah target Renstra, sehingga diperlukan penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian target kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 4,180,000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 4,180,000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 17. Perbandingan IKU 15 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) memiliki nilai UPT capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Pangkalan PSDKP Tual dan Benoa dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, dan Batam.

IKU 16 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa

yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengendalian manajemen risiko yang dituangkan dalam form pengendalian dan pemantauan risiko. Rencana pengendalian risiko sebanyak 14 dokumen. Dokumen tersebut telah terpenuhi sebanyak 14 dokumen setiap triwulan dan disampaikan kepada tim SPIP, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 100%.

Tabel 38. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) tahun 2025

IKU	2025		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100

Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah dilakukan secara rutin setiap triwulan dari tahun 2025. Kegiatan ini juga rutin dipantau oleh Seditjen PSDKP melalui luring maupun daring lingkup Ditjen PSDKP. Berikut capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) periode 2021-2025 :

Tabel 39. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2021-2025

IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	-	-	-	80,50	79,25	98,45	100	100	100

Pada tahun 2025, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100 dengan capaian 100% . Jika dibandingkan dengan tahun 2024, IKU ini mengalami peningkatan sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil dalam melaksanakan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dilakukan setiap triwulan di tahun 2025 dengan output kendali tinggi. Sumber data yang digunakan adalah form pengendalian dan pemantauan risiko.

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 yang menetapkan capaian 100 % secara konsisten pada setiap tahun, maka kinerja tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra, yang menunjukkan bahwa penerapan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko telah dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Ketercapaian IKU ini tidak lepas dari aktifnya pegawai/tim SPIP dalam mengingatkan pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan rencana pengendalian. Tim SPIP Pangkalan PSDKP Jakarta juga telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait IKU ini yaitu *Workshop* SPIP.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 16. Perbandingan IKU 16 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) memiliki nilai UPT capaian yang sama dengan UPT Pangkalan PSDKP Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Benoa yaitu 100%.

IKU 17 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)”

Capaian kinerja IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 63/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III Lingkup Ditjen PSDKP” periode Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Realisasi IKU IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 realisasi 100 dengan capaian 100% .

Tabel 40. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) tahun 2025

IKU	2025		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	105

Berikut capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) periode 2021-2025 :

Tabel 41. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan periode 2021-2025

	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	-	-	-	-	-	80,50	79,25	98,45	100	100	100

Pada tahun 2025, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100 dengan capaian 100% . Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi 79,25 dan capaian 98,45%, maka pada tahun 2025 IKU ini mengalami peningkatan sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil dalam melaksanakan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Meningkatnya pelaksanaan IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta karena telah dilakukan secara rutin setiap triwulan dari tahun 2025, kegiatan ini juga rutin dipantau oleh Sesditjen PSDKP melalui luring maupun daring lingkup Ditjen PSDKP sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan efisien.

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 mencapai 100 %, melebihi target sebesar 95 %. Capaian tersebut juga melampaui seluruh target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, sehingga menunjukkan komitmen kuat

Pangkalan PSDKP Jakarta dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara akuntabel.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 4.180.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.180.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini. Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Benoa memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 18. Perbandingan IKU 17 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) memiliki nilai UPT capaian yang sama dengan UPT Pangkalan PSDKP Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Benoa yaitu 100

IKU 18 “Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)”

Nilai kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali melalui aplikasi Susan KKP. Nilai SKM pada tahun 2025 merupakan nilai IKU “Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” yaitu sebesar 92,14 dengan capaian sebesar 115% sesuai dengan Nota Dinas NOMOR 75/DJPSDKP.1/HP.430/I/2026 dari Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP perihal Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Tahun 2025 dengan jumlah responden pada Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 71 pelaku usaha dengan produk layanan Standar Laik Operasi (SLO) dan Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan. Berikut nilai kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode tahun 2025 :

Tabel 42. IKU Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik tahun 2025

IKU	2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	92.14	115

Kegiatan ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, nilai IKM di dapatkan pada survey kepuasan masyarakat secara manual atau menggunakan form/kertas yang diisi oleh pengguna layanan, akan tetapi tahun 2025 pengisian sudah menggunakan *mobile* melalui aplikasi Susan KKP melalui laman <https://ptsp.kkp.go.id/skm/p/home>.

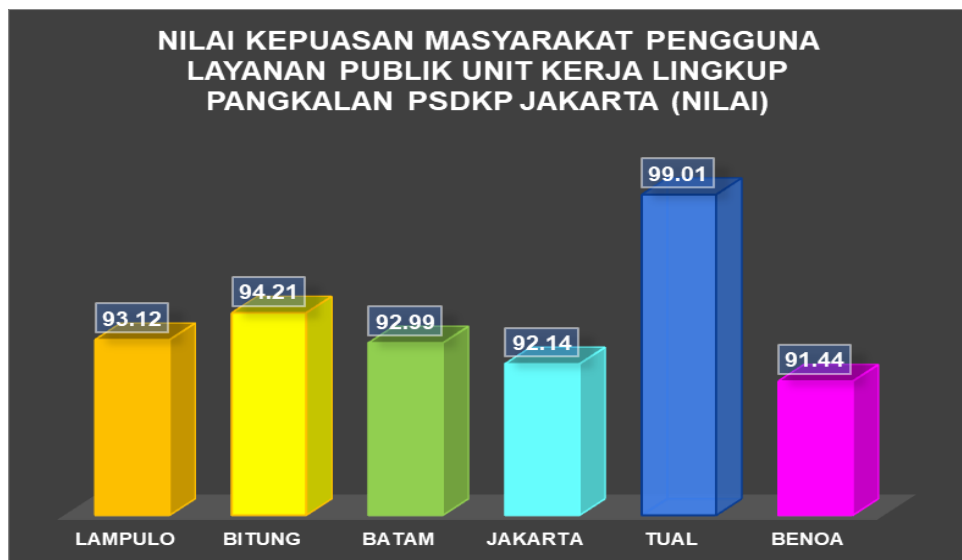
Keberhasilan IKU Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks) karena adanya inovasi dan kemudahan pengguna jasa layanan publik dalam memberikan penilaian yang dapat dilakukan secara *mobile* dan *online*, sehingga memudahkan pengguna jasa layanan dalam memberikan penilaian penggunaan layanan publik yang dapat diakses dari mana saja serta terselenggaranya Forum Konsultasi Publik sebagai wadah untuk diskusi dan menerima aspirasi dari pengguna jasa layanan publik.

Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi 92,14, melampaui target sebesar 80. Capaian

tersebut juga melebihi seluruh target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, yaitu 80 pada tahun 2025 hingga 89,5 pada tahun 2029, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan secara sangat baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini terhadap 4 IKU (IKU 18, IKU 19, IKU 20, dan IKU 21) sebesar Rp 7.201.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.201.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini berdasarkan analisis capaian kinerja yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%. Kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang mendukung pelayanan prima yaitu Forum Konsultasi Publik.

Capaian IKU “Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 19. Perbandingan IKU 18 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai) memiliki nilai yang berbeda dengan semua UPT lainnya yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan Benoa dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, dan Tual.

IKU 19 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pangkalan PSDKP Jakarta akan melaksanakan kegiatan “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP” pada triwulan IV atau akhir tahun. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Penilaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai) tahun 2025 yang berasal dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal dari Biro Umum NOMOR 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025 perihal Ralat Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 pada Pangkalan PSDKP Jakarta dengan nilai realisasi 84,9 capaian 113%. Berikut nilai Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode tahun 2025 :

Tabel 43. IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai) tahun 2025

IKU	2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	75	84.9	113.2

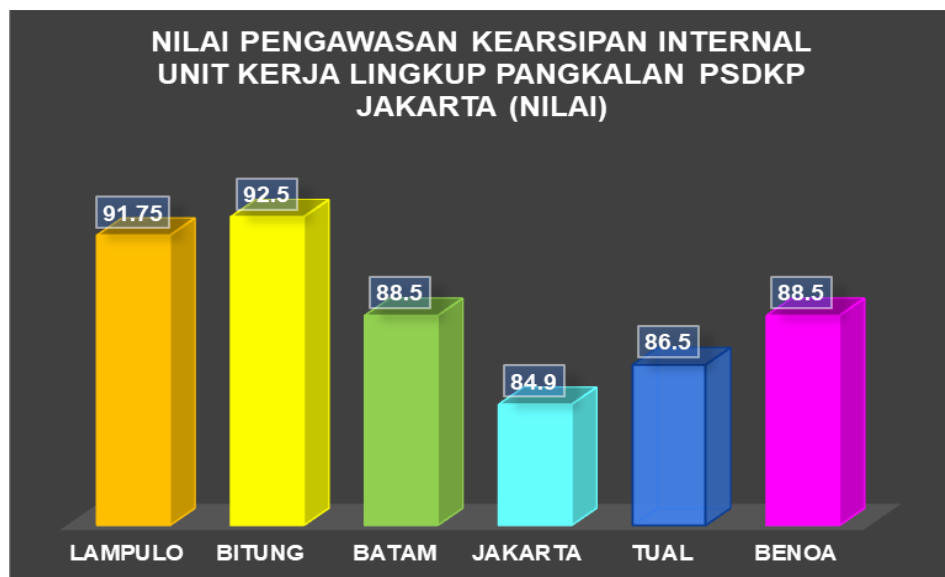
Kegiatan ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya, Pangkalan PSDKP Jakarta mendapatkan nilai realisasi 84,9 dengan predikat A (Memuaskan) berdasarkan penilaian aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumberdaya kearsipan.

Keberhasilan IKU Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai) dikarenakan Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki Arsiparis dan tim kearsipan yang aktif dan didukung dengan mengikuti *workshop*/diklat terkait kearsipan.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi 92,14, melampaui target tahun 2025 sebesar 80. Capaian tersebut juga melebihi seluruh target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 yang ditetapkan secara bertahap dari 80 hingga 84, sehingga menunjukkan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal telah berjalan sangat baik dan mendukung peningkatan tata kelola organisasi.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini terhadap 4 IKU (IKU 18, IKU 19, IKU 20, dan IKU 21) sebesar Rp 7.201.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.201.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini berdasarkan analisis capaian kinerja yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 19. Perbandingan IKU 19 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai) memiliki nilai yang berbeda dengan semua UPT lainnya yaitu lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Bena.

IKU 20 “Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit)”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Jakarta telah menghasilkan 1 inovasi. Inovasi yang telah diterapkan untuk mendukung pelayanan publik adalah MASHBRO PINTER (Message Broadcast Pelaku usaha Semakin tertib) Inovasi ini juga telah diikutsertakan dalam lomba inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2025 pada bulan Desember 2025. Realisasi kegiatan ini sebesar 1 (satu) inovasi dengan capaian sebesar 104%. Berikut nilai IKU Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik periode 2021-2025 :

Tabel 43. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit) periode 2021-2025

IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)”	1	1	100	1	1	100	1	2	100	77	80,07	104

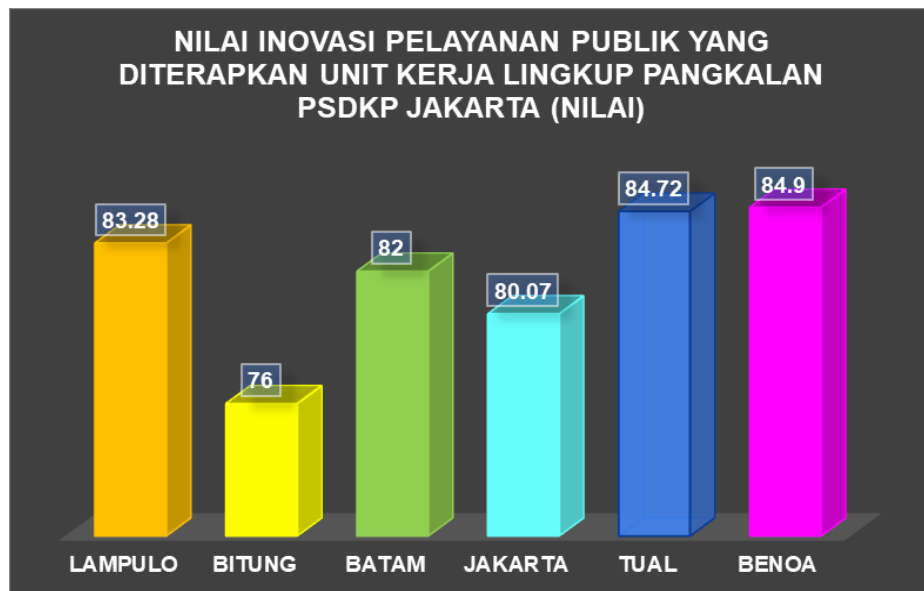
Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 realisasi Pangkalan PSDKP Jakarta realisasi sebesar 80,07 dan capaian 104%. Penilaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan capaian IKU.

Keberhasilan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit) dalam mencapai realisasi sebesar 104% dikarenakan Pangkalan PSDKP Jakarta membentuk Tim GKM yang melaksanakan inovasi sehingga dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan terarah.

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 mencapai realisasi 80,07, melampaui target tahun 2025 sebesar 77. Jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, yaitu 77 pada tahun 2025, 78 pada tahun 2026, 79 pada tahun 2027, serta 80 pada tahun 2028 dan 2029, maka capaian tahun 2025 telah melampaui target Renstra hingga tahun 2029, yang mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini terhadap 4 IKU (IKU 18, IKU 19, IKU 20, dan IKU 21) sebesar Rp 7.201.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.201.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini berdasarkan analisis capaian kinerja yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

Capaian IKU “Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit)” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dengan unit kerja lain :



Grafik 20. Perbandingan IKU 20 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit) memiliki indeks berbeda dengan semua UPT lainnya yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Bitung dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, Tual dan Benoa.

IKU 21 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada tahun 2024, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja dengan melengkapi data dukung sesuai dengan LKE budaya kerja. Penilaian dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Pangkalan PSKDP Jakarta mendapatkan nilai 81,87 dengan capaian sebesar 117%. Berikut nilai implementasi budaya kerja periode 2021-2025 :

Tabel 44. Nilai implementasi budaya kerja unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit) periode 2021-2025

IKU	2021			2022			2024			2025		
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	%	T	R	%
Nilai implementasi budaya kerja (nilai)	-	-	-	21	23,01	110	21	23,83	113	70	81,87	117

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh nilai budaya kerja sebesar 113% dan meningkat pada tahun ini 117%. Peningkatan tahun ini merupakan keberhasilan yang didukung seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta dalam menjalankan budaya kerja yang baik. Tim GKM Pangkalan PSDKP Jakarta juga terlibat dalam penilaian program budaya kerja ini dalam mengoptimalkan kegiatan yang ada untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

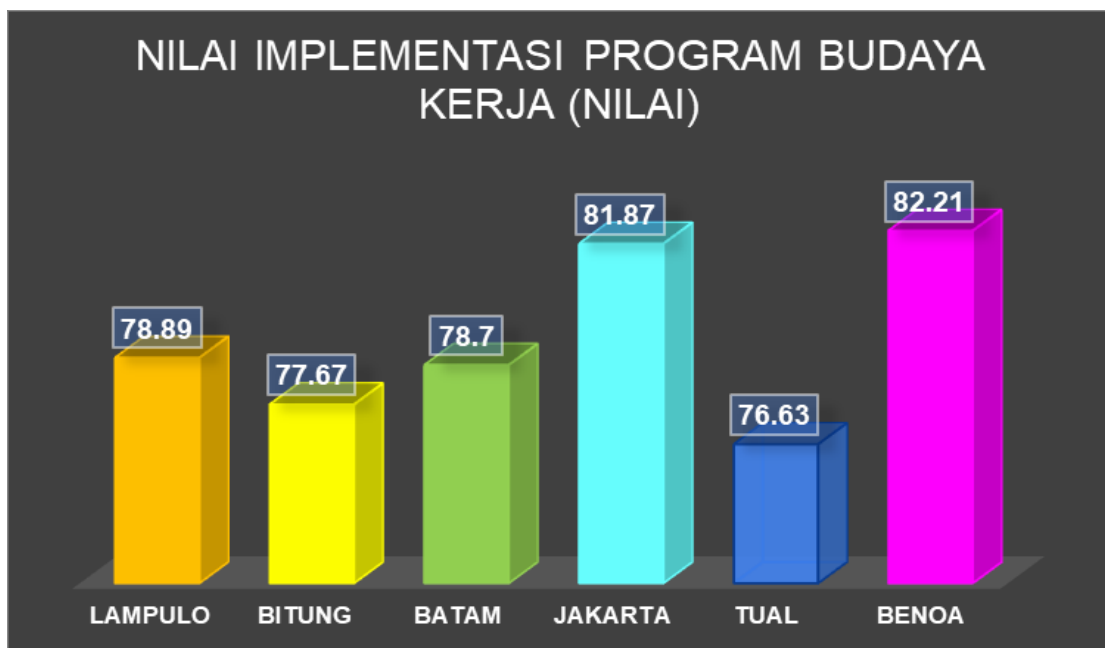
Terpenuhinya target pada IKU ini membuktikan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja dengan baik. Kegiatan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan dalam memberikan arahan pada setiap apel pagi untuk meningkatkan integritas diri dalam menjalankan suatu pekerjaan serta tim GKM yang selalu mengingatkan untuk tetap menjaga budaya kerja yang baik.

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja pada tahun 2025 mencapai realisasi 81,87, melampaui target tahun 2025 sebesar 70. Jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 yang meningkat secara bertahap dari 70 hingga 74, capaian tahun 2025 tersebut telah melampaui seluruh target Renstra, yang menunjukkan

implementasi program budaya kerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta telah berjalan sangat baik dan berkelanjutan.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini terhadap 4 IKU (IKU 18, IKU 19, IKU 20, dan IKU 21) sebesar Rp 7.201.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.201.000,- (100%). Anggaran terealisasi untuk kegiatan ini berdasarkan analisis capaian kinerja yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%. Kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang mendukung pelayanan prima yaitu Forum Konsultasi Publik.

Capaian IKU “Nilai implementasi program budaya kerja” pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai implementasi program budaya kerja” dengan unit kerja lain :

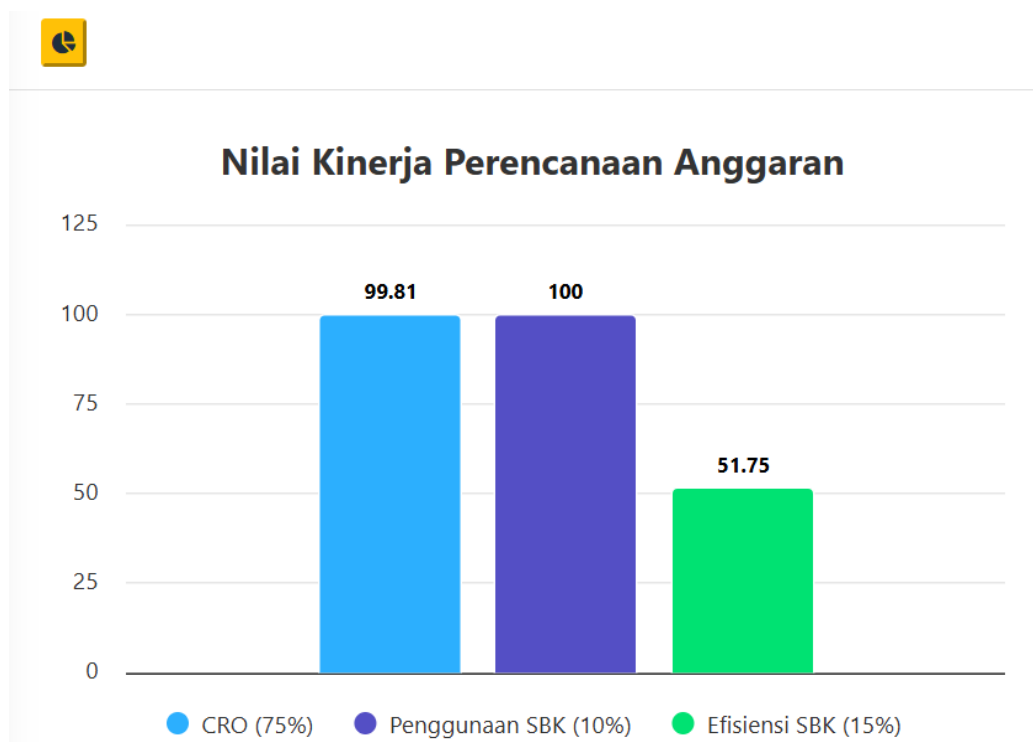


Grafik 21. Perbandingan IKU 21 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta terhadap IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai) memiliki indeks berbeda dengan semua UPT lainnya yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Batam, dan Tual, dan lebih rendah dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP Bena.

EFISIENSI

Perhitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumberdaya khususnya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART Kementerian keuangan sebesar 51,75. Berikut rincian hasil perhitungan nilai efisiensi berdasarkan aplikasi SMART :



Nilai **Capaian RO (CRO)** sebagai indikator efektivitas dengan bobot 75% memperoleh skor **99,81**, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah selaras dengan target output yang ditetapkan. Sementara itu, **Penggunaan SBK** dengan bobot 10% mencapai nilai **100**, menandakan kesesuaian penuh dalam penerapan Standar Biaya Keluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, pada aspek **Efisiensi SBK** yang memiliki bobot 15%, nilai yang diperoleh masih sebesar **51,75**. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian efisiensi belum optimal dan masih menunggu penyelesaian proses pemetaan SBK sebagai dasar pengukuran yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, **nilai kinerja perencanaan anggaran saat ini baru dihitung berdasarkan aspek efektivitas**, sementara penilaian efisiensi akan disempurnakan setelah proses pemetaan SBK selesai. Kondisi ini menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas perencanaan anggaran ke depan agar tidak hanya efektif, tetapi juga efisien.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 dengan DIPA awal sebesar Rp **36.104.351.000,-** dan DIPA akhir sebesar Rp **31.670.863.000,-** sesuai dengan DIPA Pangkalan PSDKP Jakarta, DIPA Pangkalan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Jakarta Nomor : SP DIPA-032.05.2.440816/2025, tanggal 2 Desember 2024. Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan 8 kali revisi anggaran dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran Ditjen PSDKP TA.2023 sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PSDKP :

Table 21. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Tahun 2025

	Kegiatan	Pagu Tahun 2025	Realisasi 2025	Sisa Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (%)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	10,098,856,000	8,848,278,771	1,250,577,229	87,62
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	172,270,000	172,270,000	0	100
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	800,011,000	800,010,000	1,000	100
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20,599,726,000	20,390,549,732	209,176,268	98,98
	Total	31,670,863,000	30,211,108,503	1,459,754,497	95,39

Berdasarkan data Tabel diatas Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2025 sebesar Rp. **30.211.108.503,-** dan sisa anggaran tahun 2025 sebesar Rp. **1.459.754.497,-** dengan akumulasi persentase sebesar **95,39%**. Jika dihitung tanpa memperhitungkan anggaran PNBPN yang tidak bisa digunakan senilai Rp **1.250.437.000** dan blokir Rupiah Murni senilai Rp **200.506.000**, sehingga akumulasi persentase sebesar **99,99%**. Data capaian realisasi anggaran perbulan dapat dilihat pada Grafik berikut :

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode tahun 2025 menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2025. yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam setiap triwulan berjalan dan triwulan sebelumnya. Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi seluruh target IKU yang ditentukan pada Triwulan IV dengan jumlah 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2025 sebesar 108,86.

4.2 Rekomendasi

Melakukan sosialisasi dan pembahasan teknis secara internal mengenai perubahan metode perhitungan dan indikator pada Manual IKU tanggal 15 Desember, agar seluruh tim intelijen Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki pemahaman yang seragam dalam penyusunan data dukung.

BAB V. LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Sertifikat Penghargaan
4. Piagam Penghargaan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Bintoro

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Sigit Bintoro

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75
		3 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7 Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	92

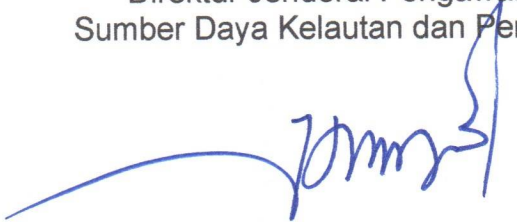
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	88,5
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	80
		20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit)	1
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	10.622.217.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	316.775.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.026.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	1.400.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	21.738.822.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025		36.104.351.000

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta



Sigit Bintoro



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdtkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Bintoro

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Sigit Bintoro

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92
		7 Indeks operasi speedboat pengawas	92
		8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	86

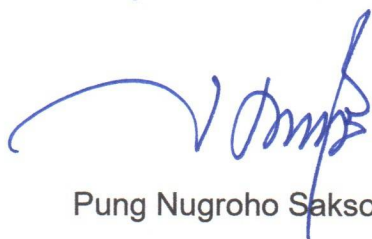
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta	100%
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	80
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	75
		20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Jakarta	77
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	10.098.856.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	172.270.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	800.011.000
2.	Program Dukungan Manajemen	20.599.726.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025		31.670.863.000

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta



Sigit Bintoro

3. Sertifikat Penghargaan



Gambar 3. Sertifikat Penghargaan Lomba Foto



Gambar 1. Certificate of Confidence ISO 9001:2015



Gambar 2. Sertifikat Penghargaan Lomba Video

4. Piagam Penghargaan



Gambar 4. Piagam Penghargaan Unit Organisasi Berpredikat Informatif